



Koperasi, Akses Pasar, dan Nilai Tambah Kopi Rakyat: Studi Komparatif Rantai Nilai Kopi Berbasis Kolektif dan Rantai Nilai Berbasis Pedagang

Mario Teguh¹

¹*University of Banten; Email: marioteguh@uns.ac.id*

***Corresponding Author:** marioteguh@uns.ac.id

Citation: Aziz (2026). The Title of Article (Book Antiqua 14pt Bold). *Agricultural Sciences*, 10(4), xx–xx.
<https://doi.org/0000-0000>

Published: 04/05/2026

ABSTRACT

This article examines how different farmer-market institutions shape value addition and income security in smallholder coffee value chains in Indonesia. The study compares two value-chain models: cooperative-based coffee marketing and trader-dominated coffee marketing. Using secondary data, policy reports, and value-chain literature, the article analyzes bargaining power, quality upgrading, price transmission, certification access, and farmer income stability. The findings show that cooperative-based chains provide stronger opportunities for quality improvement, collective bargaining, traceability, and access to specialty markets. However, cooperatives require managerial capacity, trust, working capital, and quality-control systems. Trader-dominated chains offer liquidity and flexible transactions but often limit farmer bargaining power and reduce incentives for post-harvest quality upgrading. The novelty of this article lies in linking institutional economics, value-chain governance, and smallholder upgrading in a comparative framework. The article argues that value addition in coffee farming is not determined only by agroecological quality but by institutional arrangements that govern quality standards, information flows, and market access. The study contributes to agricultural sciences and agribusiness policy by proposing that farmer institutions should be treated as productive infrastructure, not merely social organizations.

Keywords: coffee value chain; farmer cooperatives; market access; bargaining power; smallholders; Indonesia

INTRODUCTION

Kopi merupakan komoditas perkebunan strategis yang menghubungkan petani kecil dengan pasar nasional dan global. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai produsen kopi, dengan produksi yang sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat (BPS, 2024; Kementerian Pertanian, 2025). Dalam pasar global, kopi tidak hanya diperdagangkan sebagai komoditas curah, tetapi juga sebagai produk bernilai tambah melalui diferensiasi mutu, asal geografis, sertifikasi, praktik keberlanjutan, dan narasi sosial-ekologis. Namun, kemampuan petani memperoleh manfaat dari nilai tambah tersebut sangat bergantung pada kelembagaan rantai nilai.

Literatur global value chain menunjukkan bahwa posisi aktor dalam rantai nilai menentukan kemampuan memperoleh nilai tambah (Gereffi et al., 2005). Petani kecil sering berada pada posisi paling lemah karena menjual produk mentah, memiliki akses informasi harga terbatas, dan menghadapi ketergantungan pada pedagang lokal. Dalam konteks kopi, upgrading dapat terjadi melalui perbaikan panen, sortasi, fermentasi, pengeringan, penyimpanan, sertifikasi, dan hubungan langsung dengan pembeli premium (Ponte, 2002; Neilson & Pritchard, 2009).

Namun, upgrading tidak otomatis terjadi hanya karena pasar kopi spesialti berkembang. Petani memerlukan organisasi kolektif untuk memenuhi volume, mutu, traceability, dan standar keberlanjutan. Koperasi petani dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mengurangi biaya transaksi, meningkatkan daya tawar, menyediakan layanan pascapanen, dan membuka akses pasar (Markelova et al., 2009). Sebaliknya, rantai berbasis pedagang sering memberikan keuntungan berupa likuiditas cepat dan fleksibilitas, tetapi kurang mendorong investasi mutu jangka panjang.

Research gap artikel ini terletak pada keterbatasan studi yang menghubungkan kelembagaan koperasi dengan mekanisme nilai tambah secara eksplisit. Banyak studi menilai koperasi dari sisi partisipasi atau pendapatan, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana koperasi mengubah tata kelola mutu, informasi harga, dan hubungan pasar. Secara empiris, konteks kopi Indonesia penting karena petani kecil menghadapi peluang pasar spesialti sekaligus tekanan harga komoditas. Secara teoritis, artikel ini menghubungkan institutional economics dengan global value chain untuk menjelaskan upgrading petani kecil.

Kebaruan artikel ini terletak pada argumen bahwa kelembagaan petani merupakan infrastruktur produktif. Koperasi bukan hanya organisasi sosial, melainkan mekanisme ekonomi yang memungkinkan standarisasi mutu, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan posisi tawar. Tujuan artikel ini adalah membandingkan rantai nilai kopi berbasis koperasi dan rantai nilai berbasis pedagang dalam membentuk nilai tambah, daya tawar, dan stabilitas pendapatan petani.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif berbasis data sekunder dan sintesis literatur. Dua model yang dibandingkan adalah rantai nilai kopi berbasis koperasi dan rantai nilai kopi

berbasis pedagang. Unit analisis adalah kelembagaan rantai nilai, bukan rumah tangga petani individual.

Data berasal dari publikasi BPS tentang statistik kopi, Kementerian Pertanian, FAO, laporan pasar komoditas, dan literatur akademik rantai nilai. Variabel pembanding meliputi akses pasar, daya tawar, mutu pascapanen, traceability, likuiditas transaksi, dan stabilitas pendapatan. Analisis dilakukan dengan kerangka value-chain governance dan institutional economics. Validasi dilakukan melalui triangulasi antara dokumen statistik, laporan kelembagaan, dan literatur. Batasan studi ini adalah tidak menghitung margin pemasaran primer sehingga analisis bersifat konseptual-empiris berbasis data sekunder.

Hasil dan Diskusi

4.1 Kelembagaan Pasar dan Daya Tawar Petani

Rantai berbasis pedagang biasanya ditandai oleh hubungan transaksi cepat, pembayaran tunai, dan fleksibilitas volume. Model ini penting bagi petani yang membutuhkan likuiditas segera. Namun, posisi tawar petani terbatas karena harga sering ditentukan oleh pedagang berdasarkan kualitas visual, kadar air, dan harga pasar yang tidak sepenuhnya transparan.

Koperasi menawarkan mekanisme berbeda. Dengan mengumpulkan volume, koperasi dapat bernegosiasi dengan pembeli lebih besar, menyediakan informasi harga, dan menunda penjualan sampai kualitas memenuhi standar. Kekuatan koperasi berasal dari kemampuan mengubah transaksi individual menjadi transaksi kolektif. Namun, koperasi hanya efektif jika memiliki tata kelola internal yang transparan, modal kerja, dan sistem pembayaran yang dipercaya petani.

Temuan ini mendukung Markelova et al. (2009), tetapi juga memperluasnya dengan menekankan bahwa daya tawar bukan hanya hasil dari pengorganisasian petani, melainkan dari kemampuan kelembagaan memenuhi standar pasar. Koperasi yang tidak mampu menjaga mutu atau pembayaran tepat waktu dapat kehilangan legitimasi.

4.2 Mutu Pascapanen dan Upgrading Rantai Nilai

Nilai tambah kopi sangat dipengaruhi oleh proses pascapanen. Panen selektif, sortasi, fermentasi, pengeringan, penyimpanan, dan grading menentukan apakah kopi dijual sebagai komoditas curah atau produk premium. Rantai berbasis pedagang cenderung memberikan insentif mutu yang terbatas jika selisih harga tidak cukup jelas. Petani dapat memilih menjual cepat karena membutuhkan uang tunai.

Pada rantai berbasis koperasi, mutu dapat ditingkatkan melalui standar kolektif. Koperasi dapat menyediakan unit pengolahan, pelatihan pascapanen, dan kontrol mutu. Dengan traceability, koperasi dapat menghubungkan kualitas lahan, varietas, proses, dan identitas asal dengan permintaan pasar. Dengan demikian, upgrading bukan hanya praktik teknis, tetapi juga proses institusional.

Temuan ini sejalan dengan Ponte (2002), yang menekankan pentingnya standar dan kualitas dalam rantai nilai kopi. Namun, artikel ini menambahkan bahwa standar hanya menguntungkan petani jika mereka

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

memiliki kelembagaan yang mampu menegosiasikan nilai tambah. Tanpa koperasi atau organisasi kuat, standar dapat berubah menjadi beban kepatuhan.

4.3 Stabilitas Pendapatan dan Risiko Pasar

Pasar kopi dipengaruhi oleh harga global, nilai tukar, kualitas, dan preferensi konsumen. Petani kecil rentan terhadap volatilitas karena menjual dalam volume kecil dan sering tidak memiliki kapasitas menyimpan produk. Rantai berbasis pedagang mengurangi risiko likuiditas, tetapi tidak selalu mengurangi risiko harga. Koperasi dapat memperkuat stabilitas pendapatan melalui kontrak, akses pasar premium, dan pembagian informasi harga.

Namun, koperasi juga menghadapi risiko kelembagaan. Jika modal kerja terbatas, koperasi tidak mampu membeli kopi petani secara cepat. Jika tata kelola lemah, kepercayaan menurun. Dengan demikian, koperasi bukan solusi otomatis. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas manajerial, akuntabilitas, hubungan pasar, dan dukungan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perkebunan rakyat perlu memperlakukan kelembagaan petani sebagai bagian dari strategi produktivitas. Peningkatan produksi tanpa peningkatan posisi pasar hanya memperbesar volume komoditas mentah. Sebaliknya, penguatan koperasi memungkinkan petani bergerak dari produksi primer menuju penciptaan nilai tambah.

4.4 Tabel Analitis Bukti Empiris

Variabel	Temuan Empiris	Bukti Data/Kutipan	Interpretasi Analitis
Daya tawar	Koperasi memperkuat posisi negosiasi melalui volume kolektif	Produksi kopi Indonesia didominasi perkebunan rakyat (BPS, 2024)	Skala kolektif mengurangi kelemahan transaksi individual
Mutu pascapanen	Koperasi lebih mampu membangun standar mutu	Rantai kopi premium menuntut traceability dan kualitas (Ponte, 2002)	Nilai tambah bergantung pada institusi pengendali mutu
Likuiditas	Pedagang menyediakan pembayaran cepat	Petani kecil sering membutuhkan transaksi tunai (Markelova et al., 2009)	Fleksibilitas pedagang menjawab kebutuhan jangka pendek

Stabilitas pendapatan	Kontrak dan pasar premium dapat menstabilkan harga	Upgrading rantai nilai memerlukan akses pasar (Gereffi et al., 2005)	Kelembagaan pasar menentukan distribusi nilai tambah
------------------------------	--	--	--

Sumber: diolah dari BPS (2024), Kementerian Pertanian (2025), Ponte (2002), Gereffi et al. (2005), dan Markelova et al. (2009).

4.5 Model Konseptual

Akses Pasar → Kelembagaan Kolektif → Kontrol Mutu → Daya Tawar → Keamanan Pendapatan Petani

Model ini menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan petani kopi tidak cukup dicapai melalui peningkatan produksi. Nilai tambah muncul ketika petani memiliki kelembagaan yang mampu mengontrol mutu dan mengakses pasar bernilai tinggi.

CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa rantai nilai kopi rakyat sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pasar. Rantai berbasis pedagang memberikan likuiditas dan fleksibilitas, tetapi sering membatasi daya tawar dan insentif peningkatan mutu. Rantai berbasis koperasi memberikan peluang lebih besar untuk akses pasar premium, traceability, kontrol mutu, dan stabilitas pendapatan. Namun, koperasi hanya efektif jika memiliki tata kelola kuat, modal kerja, dan hubungan pasar yang kredibel.

Secara teoritis, artikel ini berkontribusi dengan menghubungkan ekonomi kelembagaan dan teori rantai nilai untuk menjelaskan upgrading petani kecil. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kopi rakyat perlu melampaui bantuan bibit atau peningkatan produksi. Kebijakan perlu memperkuat koperasi sebagai infrastruktur produktif melalui pembiayaan, pelatihan manajemen, fasilitas pascapanen, sertifikasi, dan akses pembeli. Dengan demikian, transformasi kopi rakyat dapat bergerak dari produksi komoditas mentah menuju penciptaan nilai tambah yang lebih adil.

REFERENCES

BPS. (2024). *Statistik Kopi Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.

FAO. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023*. Food and Agriculture Organization.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). *The governance of global value chains. Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.

Kementerian Pertanian. (2025). *Statistik Makro Sektor Pertanian 2025*. Kementerian Pertanian Republik

Indonesia.

- Markelova, H., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., & Dohrn, S. (2009). *Collective action for smallholder market access. Food Policy, 34(1), 1–7.*
- Neilson, J., & Pritchard, B. (2009). *Value Chain Struggles: Institutions and Governance in the Plantation Districts of South India. Wiley-Blackwell.*
- Ponte, S. (2002). *The latte revolution? Regulation, markets and consumption in the global coffee chain. World Development, 30(7), 1099–1122.*
- Raynolds, L. T. (2009). *Mainstreaming fair trade coffee. World Development, 37(6), 1083–1093.*
- Ruben, R., & Fort, R. (2012). *The impact of fair trade certification for coffee farmers. World Development, 40(3), 570–582.*
- World Bank. (2024). *Indonesia Agriculture and Climate Resilience Report. World Bank.*
- Donovan, J., & Poole, N. (2014). *Changing asset endowments and smallholder participation in higher value markets. World Development, 63, 66–78.*
- Barrett, C. B. (2008). *Smallholder market participation. Food Policy, 33(4), 299–317.*